

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919
Laman www.satpolpp.kalbarprov.go.id _ Pos-el satpolpp@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 93 /SATPOL.PP/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

13. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Keputusan ini.

KEDUA

: Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal : 3 Juli 2024

Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,


EDDY KARMILAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919
Laman www.satpolpp.kalbarprov.go.id _ Pos-el satpolpp@kalbarprov.go.id

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDDY KARMILAN, S.H., M.E.

NIP : 19690501 199803 1 008

Jabatan : Plh. Kepala Satuan

Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini telah disesuaikan dengan hasil penyelarasan dan verifikasi dengan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 bersama Tim Verifikator dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat

EDDY KARMILAN, S.H., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690501 199803 1 008

PERSETUJUAN
KETUA TIM VERIFIKATOR RENJA
PERANGKAT DAERAH

(.....)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya dengan memuat rancangan kebijakan, program dan kegiatan, dan permasalahan pada Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja menjabarkan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Rencana Kerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai dengan penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapai kinerja dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *input*, *output* dan *outcomes*. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Dengan demikian, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan langkah awal untuk pelaksanaan perencanaan pelaksanaan pembangunan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
- m. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

- n. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dimaksudkan merumuskan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan;
- Mensinergikan rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2025 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan;
- Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengumpulan data kinerja saat ini belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 terdapat 2 (**dua**) **sasaran** dengan menyesuaikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026. Dari 2 (dua) sasaran yang dilakukan pengukurannya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalimantan Barat	Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat	100 %
2.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan kualitas kebijakan publik	Nilai SAKIP	BB

Pelaksanaan capaian sasaran pada tahun 2024 merupakan peralihan penyusunan indikator kinerja utama dan target sebagai tujuan utama OPD dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Hal ini juga telah tertuang pada dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2024-2026, yang akan dijabarkan pada setiap tahunnya di dokumen Rencana Kerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan capaian yang akan dihasilkan OPD melalui pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan melihat indikator utama dengan penentuan target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya, berikut tabel penjabaran analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENCAPAIAN TARGET
1	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalimantan Barat	Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat	100%	100%

2.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan kualitas kebijakan publik	Nilai SAKIP	BB	BB
----	--	-------------	----	----

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kalimantan Barat sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar ketiga di Indonesia, dengan penduduk bersifat heterogen memiliki potensi gangguan atau konflik sosial yang rawan dari permasalahan yang bersifat SARA, budaya, politik maupun ekonomi dalam masyarakat, yang harus diantisipasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang mengemban amanat urusan wajib;
2. Pelayanan cepat atas pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada. Masih banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di Kalimantan Barat serta berulangnya pelanggaran membutuhkan strategi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat terutama yang mampu memberi efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan preventif juga harus dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin, intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda dan Perkada yang mengandung sanksi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh seluruh warga negara sesuai dengan ketentuan berlaku Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Maka respon cepat atas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi salah satu isu utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

3. Peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat yang belum maksimal terjangkau secara merata dengan tingkat demografi wilayah Kalimantan Barat saat ini. Satlinmas merupakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan/desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan fungsi Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat baik saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Sehingga diperlukan adanya pemutahiran data satlinmas merupakan dasar percepatan peningkatan kapasitas dan ketrampilan Satlinmas melaksanakan tugas dan fungsinya baik melalui pengetahuan, ketrampilan pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Satlinmas di Kalimantan Barat. Selain itu perlu dilakukan upaya untuk mendorong kabupaten/kota untuk pembentukan/penguatan Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat di tingkat kabupaten dan kota.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam review terhadap rancangan awal RKPD semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 sudah tertampung dalam rencana kerja perangkat daerah. Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 1 (satu) program teknis. Untuk kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan rutin dengan 40 (empat puluh) sub kegiatan dan 3 (tiga) kegiatan teknis dengan 16 (enam belas) sub kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun penelaahan usulan program dan kegiatan pembangunan Satuan Polisi Pamong Provinsi Kalimantan Barat yang terkait langsung dengan masyarakat antara lain :

- a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
 - Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

- Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;
 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peran Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan good governance berdasarkan kebijakan nasional salah satunya berperan sebagai perangkat yang berfungsi sebagai penegak hukum dengan ranah Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung dan mengawal kebijakan Kepala Daerah Provinsi sebagai wakil perpanjangan tangan Pemerintahan Pusat kepada Daerah sebagai bentuk implementasi Otonomi Daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah tercantum pada Pasal 2 yaitu: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota. (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Hak atas otonomi daerah ini juga tercantum pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 4 yaitu: (1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/ wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai perangkat daerah yang memiliki pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib sebagai bentuk pelayanan dasar yang memiliki fungsi menjaga ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5 (lima) adalah “menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Sehingga

dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi melaksanakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dan pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah setempat sesuai kewenangan masing-masing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan Perencanaan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat merupakan pencapaian yang ingin dilakukan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berprinsip Good Government, dengan dicapai melalui sasaran yaitu *"Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Kualitas Kebijakan Publik"*. Secara spesifik, indikator tersebut di formulasikan dengan nilai SAKIP;
- Meningkatnya penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan dicapai melalui sasaran yaitu *"Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketentraman dan ketertiban di Kalimantan Barat"*. Secara spesifik, indikator tersebut di formulasikan: *Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dibagi jumlah penduduk di Kalimantan Barat ditambah jumlah*

Satlinmas yang aktif dibagi jumlah Satlinmas di Kalimantan Barat dikali 100%.

b. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Keberhasilan pencapaian sasaran menggambarkan keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada pencapaian misi-misi yang telah ditetapkan.

Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan yang meliputi :

- Meningkatnya kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- Meningkatnya masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalimantan Barat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang terangkum dalam beberapa program dan kegiatan yang dibedakan pada kegiatan rutin dan proiritas. Adapun program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - h. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD;
 - i. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;

d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel;
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan :

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Sub Kegiatan:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - b. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
 - c. Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
 - f. Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - g. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

Sub Kegiatan :

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - d. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - e. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - f. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah.
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi;
- Sub Kegiatan :
- a. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;
 - c. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2025 tercantum pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REGISTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.523.175.600,00							8.105.900.000,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM BERTYTA PERINDUKAN MASYARAKAT						7.523.175.600,00							8.105.900.000,00	
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Target Kinerja Program Persentase Realisasi Kesuksesan Perangkat Daerah IKM	83*Angka 100*Persen 100*Persen				2.722.977.500,00						83*Angka 100*Persen 100*Persen	4.717.000.000,00	
1.05.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51* Dokumen				303.904.600,00					ASN Satpol PP Provinsi Kaltar	19* Dokumen	356.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6* Dokumen				12.553.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kdl/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Mengoptimalisasi dan Pembertarikan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Pelayanan Publik	ASN Satpol PP Provinsi Kaltar	2* Dokumen	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	5.786.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertanggungjawaban, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Saipol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	26.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1.05.01.1.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	7.437.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertanggungjawaban, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Saipol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1.05.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	7.422.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertanggungjawaban, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Saipol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1.05.01.1.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	6.537.000,00	Semua Kotakab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, dan Penyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan			5 Laporan	8.400.000,00	Semua Kotakab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, dan Penyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	3 Laporan	13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			4 Laporan	42.405.000,00	Semua Kotakab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, dan Penyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	4 Laporan	12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Solasi Renstra PD dan Renja PD														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Rangka PD yang disusun	2 Dokumen	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							15 Dokumen	137.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Brokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan					2 Berita Acara	75.844.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Brokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Berita Acara	90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39 Dokumen			13 Dokumen	280.688.000,00				Memperkuat Reformasi Pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	13 Dokumen	287.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				3 Orang/ Bulan			107 Orang/ Bulan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Pe nyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Orang/ Bulan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menemua Gaji dan Tunjangan ASN													
				3 Dokumen			4 Dokumen	247.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Pe nyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan			2 Laporan	7.358.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Pe nyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	2 Laporan	8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tinjauan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			1 Dokumen	8.415.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kele/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Percepatan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			12 Laporan	11.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kele/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Percepatan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	6 Laporan	13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen			1 Dokumen	6.394.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kele/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Percepatan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	12	13	14	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	15 Dokumen		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	4.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Menguatkan Sistem Pengawasan dan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Menguatkan Sistem Pengawasan dan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Saipol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	6.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	6 Laporan			2 Laporan	6.527.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Menguatkan Sistem Pengawasan dan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Menguatkan Sistem Pengawasan dan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Saipol PP Provinsi Kalbar	2 Laporan	4.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.03.0005	Rakonealisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD															

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.03.0006			3 Laporan		1 Laporan	5.979.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Pembinaan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat transformasi pelayanan publik	ASN Saipol PP Provinsi Kalbar	1 Laporan	4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05.0002			3 Laporan		1 Laporan	5.504.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pembinaan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat transformasi pelayanan publik	ASN Saipol PP Provinsi Kalbar	1 Laporan	5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05			18 Laporan		6 Laporan	382.240.275,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pembinaan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat transformasi pelayanan publik	ASN Saipol PP Provinsi Kalbar	6 Laporan	707.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05.0002															

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELUAS SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai/ Bendahara dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang			30 Orang	48.300.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU/DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Menguatkan Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Pejud dan Penyelundupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	30 Orang	155.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang			20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU/DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Menguatkan Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Pejud dan Penyelundupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	20 Orang	12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Laporan			11 Laporan	1.014.026.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Menguatkan Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Pejud dan Penyelundupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	11 Laporan	1.135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.05.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TASARIF OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11		12	13		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	7.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, dan Integritas serta Mengp erkuat Poin cegahan dan Pembe antasan Korupsi, Narkoba, Judul dan Pe nyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, dan Integritas serta Mengp erkuat Poin cegahan dan Pembe antasan Korupsi, Narkoba, Judul dan Pe nyeludupan	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Paket	8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	45.713.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, dan Integritas serta Mengp erkuat Poin cegahan dan Pembe antasan Korupsi, Narkoba, Judul dan Pe nyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, dan Integritas serta Mengp erkuat Poin cegahan dan Pembe antasan Korupsi, Narkoba, Judul dan Pe nyeludupan	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Paket	55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	55.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, dan Integritas serta Mengp erkuat Poin cegahan dan Pembe antasan Korupsi, Narkoba, Judul dan Pe nyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, dan Integritas serta Mengp erkuat Poin cegahan dan Pembe antasan Korupsi, Narkoba, Judul dan Pe nyeludupan	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Paket	45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		7	1 Paket	519.672.000,00	Semua Kab/Kab, Kota/Kab, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13	15	16	17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
1.05.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	30.906.000,00	Semua Kab/Kab, Kota/Kab, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Pejud dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Pejud dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Pejud dan Penyeludupan	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Paket	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kab/Kab, Kota/Kab, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Pejud dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Pejud dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Pejud dan Penyeludupan	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.06.0008		Facilitasi Kunjungan Tamu															

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan			1 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, dan Pe nyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Laporan	33.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.06.0008			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			1 Laporan	271.656.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, dan Pe nyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Laporan	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	35.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkotika, dan Pe nyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	52.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	29.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Meningkatkan erkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, dan Pe nyeludupan	Memperkuat Reformasi Pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Dokumen	36.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penambahan Barang Milik Daerah	51 unit			19 unit	136.431.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Meningkatkan erkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, dan Pe nyeludupan	Memperkuat Reformasi Pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	16 unit	135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	38.579.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Meningkatkan erkuat Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, dan Pe nyeludupan	Memperkuat Reformasi Pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Paket	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.07.0005		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	KELOMPOK SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH						
1	2		Jumlah Unit Peraklatan dan Jasa Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6	7	9 Unit	97.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mencegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	13 Memperkuat transformasi pelayanan publik	14 ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	15 5 Unit	16 100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	16 Laporan			4 Laporan	308.011.325,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mencegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	4 Laporan	1.540.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1.05.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	132.103.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mencegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat transformasi pelayanan publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Laporan	140.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1.05.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		1 Laporan	175.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Perencanaan dan Pembertan Rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Perencanaan dan Pembertan Rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Pelayanan Publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Laporan	1.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milk Daerah yang dilakukan pemeliharaan/Rehabilitasi	174 Unit		58 Unit	265.637.500,00						ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	58 Unit	537.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		2 Unit	66.815.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Perencanaan dan Pembertan Rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Pelayanan Publik	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	2 Unit	110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
1.05.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	72 Unit	6	7	24 Unit	158.672.300,00	Semua KotarKab, Semua Kecamatan, Semua Kori/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13	14	15	16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralihan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralihan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit			24 Unit	38.150.000,00	Semua KotarKab, Semua Kecamatan, Semua Kori/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mendorong pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mendorong pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	24 Unit	38.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	0,00	Semua KotarKab, Semua Kecamatan, Semua Kori/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mendorong pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mendorong pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	ASN Satpol PP Provinsi Kalbar	1 Unit	88.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketertaman Dan Ketertiban Umum Presentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Presentase Penanganan Perda Dan Perkada Yang Ditinggalkan Presentase cakupan Sullimmas	100%persen 100%orang 100%Persen 100%Persen			100 persen 100 orang 100 Persen 70 orang	4.800.201.100,00						100%persen 80%orang 100%Persen 100%Persen	3.388.900.000,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	1.05.02.1.01	3 Peningkatan Gangguan Keterseragaman dan Keterlibatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Presentase Peningkatan Kegiatan Pelanggaran Keterseragaman Dan Keterlibatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah	5 100% persen	6	7 100% persen	8 100% persen	9 2.895.072.400,00	10 10	11 11	12 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	13 Memperkuat Reformasi pelayanan publik	14 Masyarakat, OPD, ASN, Salinnas	15 100% persen	16 1.909.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Peneguhan Kojahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Peneguhan Kojahatan	2 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Memperkuat Reformasi pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN, Salinnas	1 Dokumen	47.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Keterlraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Keterlraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Memperkuat Reformasi pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN, Salinnas	1 Dokumen	5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapabilitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11		12	13		14	15
1	2	3	4	50 Orang	6	7	80 Orang	476.405.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	14	50 Orang	270.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
1.05.02.1.01.0012		Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah SOM Satuan Pertahanan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas	1 Dokumen	7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
1.05.02.1.01.0014		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	34 Dokumen			4 Dokumen	606.724.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas	15 Dokumen	570.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
1.05.02.1.01.0015		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01.0018		Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan		1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Mengcegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Mengcegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas	1 Laporan	22.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	1.05.02.1.01.0018		Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan		4 Laporan	323.584.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Mengcegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Mengcegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas	4 Laporan	130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	1.05.02.1.01.0017		Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengawasan	34 laporan		4 laporan	1.000.378.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Mengcegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Mengcegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas	15 laporan	680.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	1.05.02.1.01.0018		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang termasuk Hak Asasi Manusia													

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	180 Orang	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				50 Orang	68.348.000,00				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pengawasan dan Pembertanggungjawaban dan Pencegahan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Reformasi pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas	60 Orang	96.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0019		Penindakan atas Gangguan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perindungan Masyarakat. Bendataskan Perda dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12 Laporan			4 Laporan	199.822.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pengawasan dan Pembertanggungjawaban dan Pencegahan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Reformasi pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas	4 Laporan	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 persen			100 persen	1.593.749.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pengawasan dan Pembertanggungjawaban dan Pencegahan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Reformasi pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN	100 persen	1.178.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.02.0001		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan			4 Laporan	299.590.000,00	Semua Kotakab, Semua Kecamatan, Semua Keil/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Percepatan dan Pembeantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Pe nyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN	4 Laporan	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.02.1.02.0002		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	34 Laporan			4 Laporan	505.937.000,00	Semua Kotakab, Semua Kecamatan, Semua Keil/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Percepatan dan Pembeantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Pe nyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN	15 Laporan	445.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.02.1.02.0003		Pengamanan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamanan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	34 Laporan			4 Laporan	370.462.400,00	Semua Kotakab, Semua Kecamatan, Semua Keil/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Percepatan dan Pembeantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Pe nyeludupan	Memperkuat Transformasi pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN	15 Laporan	95.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.02.1.02.0004		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Peminaksamaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.02.0005		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	2 Unit			5 Unit	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembendalian Rantaskan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Litbang, Reformasi, dan Pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN	1 Unit	16.000.000,00		
	1.05.02.1.02.0006		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atau Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 laporan			1 laporan	88.159.300,00	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembendalian Rantaskan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Litbang, Reformasi, dan Pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN	1 laporan	25.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.02.0008		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pembendalian Rantaskan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Litbang, Reformasi, dan Pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN	1 Dokumen	7.500.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.02.0008		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
																7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 laporan		4 laporan	183.685.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Transformasi Pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN	4 laporan		230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
1.05.02.1.02.0009		Pemborkaan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penggak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemborkaan Hasil Penyidikan atau Pelaksanaan Perda	3 Dokumen		1 Dokumen	135.914.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Transformasi Pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN	1 Dokumen	58.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1.05.02.1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Presentase PPNS Yang Kompeten	100 persen		100 persen	511.379.700,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pengawasan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat Transformasi Pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN, Stalimas	100 persen	301.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
1.05.02.1.03.0004		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah															

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS DAERAH		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Kerja Lintas Daerah Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	5 3 Dokumen	6	7	8 1 Dokumen	9 81.737.200,00	10 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Memperkuat (Reformasi) Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mengoptimalisasikan dan Pembertanggungjawaban Rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	13 Memperkuat (Transformasi) pelayanan publik	14 Masyarakat, OPD, ASN, Stalinnas	15 1 Dokumen	16 52.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 laporan			1 laporan	320.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat (Reformasi) Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mengoptimalisasikan dan Pembertanggungjawaban Rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat (Transformasi) pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN, Stalinnas	4 laporan	168.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Dilat PPNS Peringkat Peraturan Daerah	9 laporan			1 laporan	108.674.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat (Reformasi) Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Mengoptimalisasikan dan Pembertanggungjawaban Rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Memperkuat (Transformasi) pelayanan publik	Masyarakat, OPD, ASN, Stalinnas	3 laporan	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
								7.523.178.600,00							8.105.900.000,00		
								J U M L A H									

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 merupakan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah disesuaikan dengan isu-isu strategis berdasarkan tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Kerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Maka perencanaan kerja perangkat daerah merupakan dokumen awal sebagai acuan Perangkat Daerah untuk menjalankan program dan kegiatan Pembangunan Daerah.

Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai Organisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Kalimantan Barat. Melalui perencanaan kerja Perangkat Daerah diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Barat.

Dengan demikian Rencana Kerja merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan.

Pontianak, Juli 2024

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,



Eddy Karmilan, S.H., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690501 199803 1 008